

LPP RRI MALANG

Agenda Keluar Nomor : 803
 Tgl. Surat Dikirim : 04 Oktober 2023 Tgl. Surat Diterima : 05 Oktober 2023
 Dari : Direktur Utama
 Perihal : Pembahan Perjanjian Kinerja Satker

Yth. Kepala RRI

KASUBAG
TATA
USAHA

KETUA
TIM
SIARAN

KETUA TIM
PEMBERITAAN

KETUA TIM
LAYANAN &
PENGEMB.
USAHA

KETUA TIM
TEKNOLOGI
DAN MEDIA
BARU

BENDAHARA

SEKRETARIAT

Diteruskan

Disposisi Kepala RRI

Dilaksanakan

Diselesaikan

Diperhatikan

Diproses

Dipelajari

Dipertimbangkan

Diketahui

Diusulkan

Diumumkan

Dibantu

Dihadiri

Arsip

Ditindaklanjuti

Ditanggapi

Mohon / Tolong dibaca dengan
 sungguh ? / cermati tambahan
 di Capaian Kinerja Satker
 (berubah dari yll) sehingga masing
 perhatikan untuk evidennya

Kepala RRI Malang

DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOTA DINAS
Nomor ND- 1225 /DU/I.PR.02.04/10/2023

Kepada : Kepala Satuan Kerja Seluruh Indonesia
Dari : Direktur Utama LPP RRI
Hal : Perubahan Perjanjian Kinerja Satker
Tanggal : 4 Oktober 2023

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/770/AA.05/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, serta Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.05.03/S-302/D402/3/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada LPP RRI Tahun 2022.

Merujuk hasil evaluasi yang dilakukan oleh instansi Pembina tersebut di atas, terdapat catatan bahwa perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi target kinerja di LPP RRI belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*). Oleh karena itu, manajemen dalam hal ini tim asesor telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang tertera pada ND-74/Dir.Keu/I.PR.02.01/01/2023 yang kemudian dituangkan pada LHR Nomor 593/RRI.SPI/06/2023. Dalam LHR tersebut, terdapat rekomendasi untuk melakukan perubahan-perubahan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 yang lebih memenuhi standar yang ditetapkan. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dan disepakatilah Perubahan Perjanjian Kinerja LPP RRI Tahun Anggaran 2023 oleh Dewas dan Direksi pada Berita Acara Nomor 1373/DU/PR.01.01/07/2023. Harapan yang lebih besar dari perubahan Perjanjian Kinerja tersebut adalah dapat menjadi pengungkit penilaian-penilaian kinerja yang dilakukan oleh instansi Pembina, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai *evidence* untuk pengusulan kenaikan tunjangan kinerja.

Untuk itu...

Untuk itu, Kepala Satuan Kerja dimohon untuk segera menandatangani Perjanjian Kinerja Perubahan pada lampiran Nota Dinas ini dan mengirimkannya pada bit.ly/PKSatkerTTD maksimal Jumat, 5 Oktober 2023. Satuan Kerja kemudian dapat berkoordinasi dengan Direktorat SDM dan Umum untuk melakukan perubahan Target Kinerja pada Aplikasi *E-Kinerja* BKN.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama,



I Hendrasmo I.

Tembusan :
Ketua Dewan Pengawas



PERJANJIAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nama Kepala Satker
Jabatan : Kepala RRI
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. I. Hendrasmo, M.A, M.M.
Jabatan : Direktur Utama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 3 Juli 2023
Pihak Pertama

Dr. I. Hendrasmo, M.A

Nama Kepala Satuan Kerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LPP RRI

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran	100%
		2. Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker	Puas
		3. Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN	100%
		4. Nilai kualitas layanan informasi publik (PPID)	Informatif
		5. Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN	100%
		6. Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi	92%
		7. Jumlah konten yang diupload di medsos official	400
		8. Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional	52
		9. Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan disetiap satker	26
		10. Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas lokal	52
		11. Jumlah siaran program tanggap bencana	52
		12. Jumlah siaran berjaringan satker	365
		13. Persentase realisasi PNBPN	60%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	1. Nilai IKPA	95
		2. Nilai Kinerja Anggaran	95
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja	65
		4. Nilai SPIP Terintegrasi	3
		5. Jumlah dokumen <i>risk register</i> satker	1
		6. Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI	100
		7. Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan LPP RRI	Rp
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum	Rp
3. Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal dan Regional	Rp

Target PNBP Rp

Pihak Kedua

Jakarta, 3 Juli 2023
Pihak Pertama

Dr. I. Hendrasmo, M.A

Kepala Satuan Kerja